



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA SERANG (STUDI KASUS PADA SMK 3 NEGERI DAN SMK NEGERI 4 KOTA SERANG)

Eli Apud Saepudin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bina Bangsa

Email: [eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id](mailto:eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id)

### Abstract

*This thesis discusses the Implementation of 2013 Curriculum Policy of Vocational High Schools in Serang City. The problems examined in this thesis are: 1. Weak Leadership of School Principals towards the implementation of the 2013 Curriculum. 2. Low Character and attitude of teachers as 2013 curriculum implementors. 3. Low Professionalism of teachers in the 2013 curriculum implementation. Lack of Facilities and Infrastructure in 2013 curriculum implementation. Adequate learning facilities and resources in the 2013 curriculum. The theory used in this study uses the theories of Daniel Mazmanian and Paul A. Sabatier (1983: 178) The methodology of this study uses descriptive qualitative approaches. The results of this study indicate that the Problem Characteristics of the Implementation of 2013 Curriculum Policy in School Vocational 3 Serang City School Vocational 4 Serang City is the lack of infrastructure in the two schools. Banten through the School Operational Assistance (BOS) fund, not only is the key to success in the successful implementation of the 2013 curriculum policy must be supported by good school leadership, teacher creativity, student activities, 2013 curriculum socialization, learning facilities and resources, academic environment conducive, and participation of school residents. Factors that Influence Outside the Policy in the implementation of 2013 curriculum policies of School Vocational 3 Serang City and School Vocational 4 Serang City are socio-economic conditions Suggestions The Implementation of 2013 Curriculum Policy in School Vocational 3 Serang City and School Vocational 4 Serang City must be supported by infrastructure complete It should not only rely on BOS funds for success in implementing the 2013 Curriculum Policy but there must be monitoring from the Provincial Government, the Education Office.*

**Keywords:** *Keywords: Implementation, Policy, Curriculum 2013, School Vocational*

### Abstrak

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Serang. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Lemahnya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap implementasi Kurikulum 2013. 2. Rendahnya Karakter dan sikap guru sebagai pelaksana kurikulum 2013. 3. Rendahnya Profesionalisme guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Fasilitas dan sumber daya pembelajaran yang memadai dalam kurikulum 2013. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983: 178) Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik Masalah Penerapan Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Vokasi 3 Kota Serang Sekolah Vokasi 4 Kota Serang adalah kurangnya infrastruktur di kedua sekolah tersebut. Banten melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak hanya kunci keberhasilan dalam keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 harus didukung oleh kepemimpinan sekolah yang baik, kreativitas guru, kegiatan siswa, sosialisasi kurikulum 2013, fasilitas dan sumber daya pembelajaran, lingkungan akademik yang kondusif,

dan partisipasi warga sekolah. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Di Luar Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Vokasi 3 Kota Serang dan Sekolah Vokasi 4 Kota Serang adalah kondisi sosial ekonomi Saran Penerapan Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Vokasi 3 Kota Serang dan Sekolah Vokasi 4 Kota Serang harus didukung dengan infrastruktur yang lengkap Tidak hanya mengandalkan dana BOS untuk keberhasilan implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 tetapi harus ada pengawasan dari Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan.

**Kata Kunci:** Kata Kunci: Pelaksanaan, Kebijakan, Kurikulum 2013, Sekolah Vokasi

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No.20 Tahun 2003 BAB 1 Pasal 1).

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Permendikbud No.70).

Jika dihitung Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 (sebelas) macam, antara lain: Tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran: Dirinci Dalam Rencana Pelajaran Terurai, 1964 Rencana Pendidikan Dasar, Tahun 1968 Kurikulum Sekolah Dasar, tahun 1974 Kurikulum PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan), Tahun 1975 Kurikulum Sekolah Dasar, Tahun 1984: Desain Kurikulum 1984. Tahun 1994: Desain Kurikulum 1994, Tahun 1997: Revisi Kurikulum 1994, Tahun 2004: Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Tahun 2006: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan Tahun 2013. Masalah yang diteliti 1. Lemahnya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap implementasi Kurikulum 2. Rendahnya Karakter dan sikap guru sebagai implementor kurikulum 2013. 3. Rendahnya Profesionalitas guru dalam implementasi kurikulum 2013. 4. Kurangnya Sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum 2013. 5. Kurangnya Fasilitas dan sumber belajar yang memadai dalam kurikulum 2013.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dalam *Lexi Moleong* (2012:4) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah metode yang di gunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan dan melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## HASIL

Gambar alur Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan Kota Serang.



Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 diterapkan sejak tahun 2014 dan berjalan baik sampai dengan saat ini.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:178) yakni 1. Karakteristik Masalah 2. Daya Dukung Kebijakan 3. Daya Dukung Di Luar Kebijakan.

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public value*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk : mewujudkan nilai-nilai yang di idealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan ; (ii) Memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat misalnya : masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pendidikan, dan pelayanan publik yang buruk; (iii) Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor; (iv) Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya; pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan. (Purwanto, Sulistyastuti 2017:64)

Karakteristik Masalah Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses pembelajarannya seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi dan sebagainya. Keberagaman perilaku implementor kebijakan kurikulum 2013 Pendidikan, baik formal maupun nonformal dan informal, merupakan media yang tepat untuk mewariskan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Melalui Kurikulum 2013, lembaga pendidikan berkesempatan mengembangkan muatan lokal untuk kemudian diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu. Materi yang dikembangkan tentu berdasarkan karakteristik wilayah dimana peserta didik bertempat tinggal, karena sejatinya setiap wilayah memiliki keragaman budaya. Melalui muatan lokal, peserta didik diharapkan dapat mengenal dan lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Implementasi Kurikulum 2013.

Daya Dukung Kebijakan Secara umum banyak faktor yang mempengaruhi tujuan dan mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, dan lingkup belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang cukup, manajemen pendidikan yang dilakukan secara profesional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Standar nasional pendidikan yang tepat untuk seluruh kalangan penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan sebagai acuan norma dalam pendidikan.

“Kebijakan Kurikulum 2013 yang sebelumnya Kurikulum 2006 KTSP berawal dari itu UU 23 Tahun 2014 undang-undang terkait hal tersebut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menengah, terkait sikap dan tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kurikulum inikan Statis dan Juga Dinamis artinya menyesuaikan dengan kebutuhan jaman. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum di fokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat di demonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang di pelajarnya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan di jadikan sebagai standar hasil penilaian belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu. Sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya”. Hasil diskusi dengan Kasi Kurikulum SMK Provinsi Banten dapat di analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Statis dan Juga Dinamis artinya menyesuaikan dengan kebutuhan jaman, kejelasan dan tujuan yang akan di capai dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di sekolah memang harus di tunjang dengan

kesiapan semua aspek karena kurikulum ini bersifat statis dan juga dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan jaman artinya tidak membuat bingung kepala sekolah, guru bahkan siswa itu sendiri.

Daya Dukung Diluar Kebijakan Kondisi sosio ekonomi saat ini sangat baik, baik di SMKN 3 dan SMKN 4 Kota Serang sehingga dapat menerima perubahan kurikulum agar pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. “Sekurang-kurangnya ada tiga kemungkinan dimana perbedaan-perbedaan kondisi semacam itu dapat mempengaruhi efektivitas dukungan politik terhadap *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana, serta pada gilirannya terhadap pencapaian tujuan-tujuan itu sendiri. Pertama, perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomi dapat memengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan di tanggulasi oleh suatu undang-undang atau keputusan-keputusan kebijakan dasar lainnya. Kalau pada suatu waktu tertentu ternyata masih ada masalah-masalah sosial lainnya dianggap jauh lebih penting –lebih serius, lebih memerlukan perhatian maka kemungkinan dukungan politik untuk mengalokasikan sumber-sumber langka, seperti dana, tenaga, keahlian, material, dan sebagainya, demi tercapainya tujuan undang-undang akan menurun secara drastis. Kedua, keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 mungkin akan sulit dicapai, mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomis setempat dan tingkat kesulitan masalah yang sering dihadapi. Perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomis tersebut akan menimbulkan desakan-desakan untuk membuat aturan-aturan yang luwes dan yang memberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan administrasi tertentu pada satuan-satuan organisasi lokal (badan-badan pelaksana daerah).”

Pertama, perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomi dapat memengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan di tanggulasi oleh suatu undang-undang atau keputusan-keputusan kebijakan dasar lainnya. Kalau pada suatu waktu tertentu ternyata masih ada masalah-masalah sosial lainnya dianggap jauh lebih penting –lebih serius, lebih memerlukan perhatian maka kemungkinan dukungan politik untuk mengalokasikan sumber-sumber langka, seperti dana, tenaga, keahlian, material, dan sebagainya, demi tercapainya tujuan undang-undang akan menurun secara drastis.

Kedua, keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 mungkin akan sulit dicapai, mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomis setempat dan tingkat kesulitan masalah yang sering dihadapi. Ketiga, dukungan terhadap peraturan yang bermaksud untuk melindungi lingkungan, konsumen, atau keselamatan kerja tampaknya berkolerasi dengan sumber-sumber keuangan dari kelompok-kelompok sasaran dan kelompok-kelompok lain yang memiliki posisi strategis dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Semakin beraneka ragam kehidupan ekonomi dan semakin makmur kelompok-kelompok sasaran tersebut, semakin besar peluang efektivitas implementasi dari undang-undang yang bermaksud mengenakan biaya-biaya produktif pada mereka.

Dari uraian-uraian di yang telah di paparkan di atas, bahwa kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi merupakan beberapa variabel eksternal kunci yang dapat memengaruhi *output-output* kebijakan badan-badan pelaksana, dan yang pada akhirnya memengaruhi pencapaian tujuan undang-undang. Kondisi-kondisi tersebut terjalin dengan implementasi melalui perubahan-perubahan dalam kelompok-kelompok kepentingan dan dukungan publik terhadap tujuan-tujuan tersebut, atau melalui badan-badan legislatif dan eksekutif atasan dari badan-badan pelaksana. Para pejabat pelaksana juga dapat memberikan respons positif terhadap perubahan-perubahan tertentu pada kondisi-kondisi lingkungan, khususnya jika mereka menganggap bahwa perubahan tersebut mendukung program-program atau nilai-nilai mereka.

Komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013 seharusnya dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional secara bertahap, namun dalam kenyataannya seringkali menghadapi berbagai masalah dan tantangan, sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan mengalami kegagalan. Oleh karena itu setiap perubahan kurikulum mestinya memperlihatkan kondisi-kondisi yang di alami dalam implementasi kurikulum sebelumnya, tidak bisa serampangan juga tidak boleh terlalu di paksakan. Kesan dipaksakan sepertinya dimiliki oleh kurikulum 2013, kurikulum ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, terjadi pro dan kontra, bahkan kurang dari satu bulan dari waktu yang di rencanakan untuk implementasi, kurikulum ini belum mendapatkan restu dari (DPR). Meskipun demikian Mendikbud Mohammad Nuh sangat optimis dengan kurikulum ini, bahkan dengan semangat yang menggebu-gebu mengungkapkan: “Pokoknya Kurikulum 2013 Harus Jalan”. Ungkap tersebut mengundang arti bahwa apapun yang terjadi, perubahan kurikulum ini tidak boleh di

tunda-tunda lagi. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kurikulum 2013 merupakan proyek yang anggarannya mencapai angka hampir 2,5 triliun. Ini merupakan proyek nasional, bahkan bisa dibilang proyek raksasa, karena melibatkan banyak orang dan lembaga. Konon, untuk membiayai implementasi kurikulum 2013 ini rencananya dimulai dengan pelatihan guru, dengan anggaran lebih dari satu triliun. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran tersebut tidak dikorupsi? Siapa bertanggung jawab jika terjadi kebocoran, tercecer, atau bahkan salah sasaran. Kunci sukses dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 adalah menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dengan kreativitas, anak-anak bangsa mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks. Meskipun demikian keberhasilan kurikulum 2013 dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif dan inovatif, serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh berbagai faktor (kunci sukses). Kunci sukses tersebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif akademik, dan partisipasi warga sekolah.

## SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik Masalah dari Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di SMK Negeri 3 Kota Serang dan SMK Negeri 4 Kota Serang adalah kurangnya sarana prasarana di kedua sekolah tersebut. Daya Dukung Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 kurang efektif karena hanya didukung dari Pemerintah Provinsi Banten melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak hanya itu saja kunci sukses dalam keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 harus didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah yang baik, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi kurikulum 2013, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan akademik yang kondusif, dan partisipasi warga sekolah. Faktor yang Berpengaruh Diluar Kebijakan dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 SMK Negeri 3 Kota Serang dan SMK Negeri 4 Kota Serang yakni faktor kondisi sosio ekonomi. Saran Seharusnya Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di SMK Negeri 3 Kota Serang dan SMK Negeri 4 Kota Serang harus ditunjang dengan sarana prasarana yang lengkap. Seharusnya untuk mensukseskan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 bukan hanya mengandalkan dari dana BOS saja akan tetapi harus adanya monitoring dari Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Terjemahan.
- Denscombe, Martin. 2007. *A Good Research Guide: for Small Scale Social Research Projects*. Edisi Ketiga. London: McGraw Hill.
- Hidayat, Sholeh. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Irfan Islamy. 2014 *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kurniasih, Imas & Sani, Berlin. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan*. Surabaya : Kata Pena
- Lexy J. Moleong, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Munir, Abdullah, 2010. *Pendidikan Karakter-Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah*, Yogyakarta : Bintang Pustaka Abadi.
- Mulyadi Deddy. 2015 *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Bandung* : ALFABETA
- Mulyasa, E. 2017 *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* Cetakan Kesepuluh. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja, A.R 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta Duta Pertiwi Foundation
- Nasution, S 2008. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta : Biana Aksara.

- Neuman, W. Lawrence, 2013. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7<sup>th</sup> Edition*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Nugroho Riant, 2011 *Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia
- Purwanto E.A & Sulistyastuti R.D 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia* Cetakan II. Yogyakarta : Gava Media
- Pasolong Harbani (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik* Cetakan kedua Bandung : ALFABETA
- Reza A.A Wattimena, 2008 *Filsafat dan Sa*  
*ins* Jakarta : Grasindo.
- Ritzer, G, 2004 *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (edisi kelima), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- R.K, Yin. 1996. *Studi Kasus. Desain dan*  
*Metode* Jakarta: Grafindo Persada.
- Rohman, Arif Wiyono, Teguh, 2010, *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta Pustaka Belajar.
- Sugiyono 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cetakan Ke-26. Bandung : Alfabeta
- Solichin A.W. 2017 *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* Edisi 1 Cetakan Ke-6. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Widodo Joko 2007 *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Analisis Proses Kebijakan Publik* Malang : Bayumedia
- Winarno, Budi. 2007 *Kebijakan Publik Teori dan Konsep*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Yin, Robert K. 2003. *Case Study Research Design and Method*. California : Sage Publications
- Sumber Lain :
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)

Permendikbud No.70 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA/SMK

- Nugraheni Vickytasari, 2013. Kurikulum 2013 lebih unggul dari pada kurikulum sebelumnya <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/19889/kurikulum-2013-lebih-unggul-daripada-kurikulum-sebelumnya.html> (online) diakses 16 September 2019
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab I pasal 1 ayat 19
- Undang-undang Nomor.20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Dokumen Kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Astridya Paramitra 2015. [www.enolsatoe.org.2015](http://www.enolsatoe.org.2015) Teknik Fokus Diskusi dalam Penelitaian Kualitatif diakses tanggal 20 Juli 2019
- AnnisaRosma2014.<https://annisarosmma.wordpress.com/2014/07/10/implementasi-kurikulum-2013/> diakses tanggal 21 Juli 2019
- Okezone 2014,10 Masalah utama kurikulum 2013 [https://news.okezone.com](https://news.okezone.com/read/2014/12/11/65/1077829/10-masalah-utama-kurikulum-2013) /read/2014/12/11/65/1077829/10-masalah-utama-kurikulum-2013 diakses 02 Agustus 2019
- Eka Sulistyawati, 2014. Kurikulum 2013 keluhan dan solusinya <http://eka-sulistyawati.blogspot.com/2013/11/kurikulum-2013-keluhan-dan-solusinya.html> diakses 5 Agustus 2019

